

PERATURAN DAERAH PROPINSI SULAWESI TENGAH

NOMOR : 03 TAHUN 2007

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN PELABUHAN KAPAL
PADA PELABUHAN REGIONAL DI PROPINSI SULAWESI TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 61 Tahun 2001 tentang Penghapusan Barang Milik Kekayaan Negara pada Departemen Perhubungan dengan tindak lanjut dialihkan kepada Pemerintah Daerah dari Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 35 Tahun 2002 tentang tatanan Kepelabuhan Nasional, maka Pelabuhan Regional adalah menjadi kewenangan Propinsi Sulawesi Tengah.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal pada pelabuhan regional di Propinsi Sulawesi Tengah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-undang Nomor 47 Prp Tahun 1964 tentang Pembentukan daerah Tingkat I Sulawesi Utara – Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan – Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7 menjadi Undang-undang Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3493);
4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Megara Republik Indonesia Nomor 4048);
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Peraturan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Megara Republik Indonesia Nomor 4548);
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4145);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI SULAWESI TENGAH
Dan
GUBERNUR SULAWESI TENGAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PELABUHAN KAPAL PADA PELABUHAN REGIONAL DI PROPINSI SULAWESI TENGAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Propinsi Sulawesi Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsure Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Kepala Daerah Propinsi Sulawesi Tengah selanjutnya disebut Gubernur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah propinsi Pemerintah Daerah..
5. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Daerah Propinsi Sulawaesi Tengah.
6. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan disekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kapal bersandar, berlabuh, naik turun penumpang dan/atau bongkar muat barang yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi.
7. Pelabuhan Regional adalah pelabuhan yang melayani / melayani angkutan penumpang, barang atau hewan antarkecamatan dalam satu propinsi.
8. Pelabuhan Umum adalah Pelabuhan yang diselenggarakan untuk kepentingan pelayanan masyarakat umum.
9. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis apapun, yang digerakkan dengan tenaga mekanik, tenaga mesin atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan dibawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.
10. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial yang pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sector swasta.
11. Pelayanan Pelabuhan Kapal adalah pelayanan pelabuhan kapal pada pelabuhan regional di wilayah Propinsi Sulawesi Tengah.
12. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu khusus disediakan dan / atau diberikan oleh Pemerintah Daerah pada Pelabuhan Laut sesuai kewenangan dan peruntukannya.
13. Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal pada Pelabuhan Regional adalah Retribusi Daerah yang merupakan bagian dari jasa usaha yang dipungut oleh Pemerintah Daerah pada Pelabuhan Laut sesuai kewenangan dan peruntukannya.
14. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan Usaha atau Badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi.
15. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi.
17. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
18. Kas Daerah adalah Kas Daerah Propinsi Sulawesi Tengah.
19. Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah, adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang Retribusi Daerah yang telah terjadi serta menemukan tersangkanya.
20. Etmal adalah satuan untuk menghitung tarif jasa tambat, dihitung dengan satuan etmal 24 jam.
21. Gross Tonnage, disingkat GT adalah ukuran daya muat / kapasitas kapal.

BAB II NAMA OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal pada pelayanan regional di Propinsi Sulawesi Tengah, dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan Jasa kepada Orang Pribadi atau Badan yang memanfaatkan jasa pada pelabuhan kapal yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Propinsi Sulawesi Tengah.

Pasal 3

- (1) Obyek Retribusi meliputi:
 - a. Pelayanan Kapal
 - b. Pelayanan Barang
 - c. Pelayanan Terminal Penumpang
 - d. Tanda Masuk orang dan Kendaraan;
 - e. Penggunaan Permukaan air
- (2) Obyek Retribusi tidak termasuk Pelayanan Pelabuhan yang di kelola oleh pihak Swasta dan BUMN.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan pelayanan Jasa di Pelabuhan Kapal

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI DAN CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 5

Retribusi Jasa Pelayanan Pelabuhan Kapal di golongan sebagai Retribusi Jasa Usaha

Pasal 6

Tingkat Penggunaan Jasa dihitung berdasarkan frekwensi pelayanan dan Pemanfaatan fasilitas yang ada di Pelabuhan Kapal sesuai kebutuhan penggunaan jasa yang dimaksud.

BAB IV PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN

Prinsip dan Sasaran dalam penetapan besarnya Retribusi Tarif Jasa Usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

BAB V

LEMBARAN DAERAH PROPINSI SULAWESI TENGAH NOMOR 3 TAHUN 2007

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Jenis dan besarnya tariff Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal ditetapkan sebagai berikut :

- a. **Retribusi Pelayanan Kapal**
1. Kapal Barang
 - a. Labuh Rp. 150,-/GT/Kunjungan
 - b. Tambat Rp. 300,-/GT/Etmal
 2. Kapal Penumpang
 - a). Labuh Rp. 100,-/GT/Kunjungan
 - b). Tambat Rp. 150,-/GT/ETmal
 3. Kapal Perikanan
 - a). Labuh Rp. 100,-/GT/Kunjungan
 - b). Tambat Rp 200,-/GT/Etmal
 4. Kapal Barang, Kapal Penumpang dan Kapal Perikanan menggunakan Kolam Pelabuhan untuk berlabuh dengan tidak melakukan kegiatan dihitung per 5 (lima) hari Rp. 15.000,-/Unit.
 5. Kapal Tongkang beserta Kapal Penariknya dan Jenis kapal lainnya menggunakan pelabuhan khusus oleh orang pribadi atau badan usaha swasta dihitung per sekali kunjungan Rp. 35.000,-/Unit.
 6. Kapal angkutan laut luar Negeri (Asing)
dipungut sebesar \$ 0,0/GT/Kunjungan
- b. **Retribusi Pelayanan Barang**
1. Jasa Dermaga
 - a. Barang antar Pulau = Rp 250,-per to/M3
(Barang, pupuk dan Barang Bulok lainnya
 - b. Barang Lainnya = Rp 400,- perton/M3
 2. Jasa Penumpukan
 - a) Gudang tertutup = Rp 500,- perton/M3/hari
 - b) Lapangan Penumpukan = Rp 250,- perton/M3?hari
- c. **Retribusi Pelayanan Terminal Penumpang**
- Pengantar Penjemput = Rp 1.000,- per orang sekali masuk
- d. **Retribusi Tanda Masuk Orang dan Kendaraan di areal Pelabuhan**
1. Tanda Masuk Orang
 - a). Tanda Masuk harian = Rp 1.000,- per orang sekali masuk
 - b). Tanda Masuk Tetap
 - 1). Per Bulan = Rp 10.000,- per orang
 - 2) Per Tahun = Rp. 100.000,- per orang
 2. Tanda Masuk Kendaraan
 - 1) Trailer, Truk Gandeng = Rp 2.500/Kend. sekali masuk
 - 2) Truck Besar = Rp 1.500/Kend sekali masuk
 - 3) Pick Up, Mobil Bus, sedan dan Jeep = Rp 1.000/Kend sekali masuk
 - 4) Sepeda Motor = Rp 500/Kend. sekali masuk
 - 5) Gerobak Dokar = Rp 500/Kend sekali masuk
 3. Tanda Masuk tetap
 - 1) Trailer, Truk Gandeng (Sopir+Kenek)
 - a) Per Bulan = Rp 50.000/ Kend sekali masuk
 - b) Per Tahun = Rp 300.000/ Kend sekali masuk
 - 2) Truk Besar
 - a) Per Bulan = Rp 30.000/ Kend sekali masuk
 - b) Per Tahun = Rp 200.000/ Kend sekali masuk
 - 3) Pic Up, Mobil Bus, Sedan dan Jeep
 - a) Per Bulan = Rp 20.000/ Kend sekali masuk
 - b) Per Tahun = Rp 150.000/ Kend sekali masuk

- 4) Sepeda Motor
a) Per Bulan = Rp 0.000/ Kend sekali masuk
b) Per Tahun = Rp 100.000/ Kend sekali masuk

e **Retribusi Penggunaan Permukaan air**

**BAB VI
WILAYAH PEMUNGUTAN, TATA CARA PEMUNGUTAN
DAN PENYETORAN**

Pasal 9

Retribusi dipungut di Wilayah Pelayanan Pelabuhan Kapal yang menjadi kewenangan Propinsi Sulawesi Tengah dimana penyelenggaraan pelabuhan tersebut diberikan.

Pasal 10

Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Daerah diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 11

Seluruh hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 merupakan penerimaan daerah dan harus disetor bruto ke Kas Daerah.

**BAB VII
SANKSI ADMINISTRASI**

Pasal 12

Dalam hal wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua perseratus) setiap bulan dari Retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

**BAB VIII
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG**

Pasal 13

Masa retribusi adalah jangka waktu sesuai dengan jenis pelayanan jasa usaha yang diberikan.

Pasal 14

Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

**BAB IX
KETENTUAN PENYIDIKAN**

Pasal 15

- (1) Pejabat Pegawai Negri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;

- b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - c. menerima keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan/ atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka dan sanksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut Hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB X KETENTUAN PIDANA

Pasal 16

- (1) Wajib Retribusi yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 setelah diupayakan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 sehingga akibat perbuatannya merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah Pelanggaran.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Propinsi Daerah Sulawesi Tengah Nomor 13 Tahun 2000 tentang Retribusi Tempat Pendaratan Kapal dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 26 Maret 2007

GUBERNUR SULAWESI TENGAH

Ttd

B. PALIUDJU

Diundangkan di Palu
pada tanggal 26 Maret 2007

SEKRETARIS DAERAH
PROPINSI SULAWESI TENGAH



GUMYADI

LEMBARAN DAERAH PROPINSI SULAWESI TENGAH NOMOR
3 TAHUN 2007